

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018
DI KABUPATEN PANGANDARAN**

EVA FAUZIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengerti artinya pemilihan gubernur (Pilgub), kurangnya strategi yang dilakukan oleh KPUD untuk menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat-tempat keramaian, kurangnya perekrutan tenaga penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, secara umum cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya perekrutan agen sosialisasi dalam melakukan sosialisasi yang hanya terdiri dari 2 orang untuk setiap kecamatan dan kurangnya kinerja dari agen sosialisasi. Salah satu upaya yang dilakukan berupa melakukan perekrutan lebih banyak lagi agen sosialisasi disetiap kecamatan dan bimbingan teknis kepada agen sosialisasi

Kata Kunci: *Strategi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partisipasi Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan

tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai Negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, bisa di identikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E yang memuat Tentang Ketentuan Pemilihan Umum.

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil yang sesuai dengan sprit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu UU tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Disisi lain Komisi Pemilihan Umum Daerah harus bertindak profesional dengan menentukan langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya dengan melaksanakan sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah serentak. Sehingga dalam lingkup Kabupaten/Kota maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota salah satunya seperti tugas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangandaran.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki misi, salah satu misinya yaitu ingin meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilukada serentak demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonseia yang demokratis.

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka KPUD harus memiliki berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak

suaranya pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak.

Keikutsertaan masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak di Kabupaten Pangandaran sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam suksesnya demokrasi di Kabupaten Pangandaran maka demokrasi di Kabupaten Pangandaran sangat sukses.

KPUD kabupaten pangandaran sebagai lembaga negara yang berada didaerah akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2018, sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum perlu adanya strategi yang baik yang dilakukan oleh KPUD kabupaten pangandaran guna meningkatkan partisipasi masyarakat kabupaten pangandaran, terlebih lagi dari hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa strategi KPUD kabupaten pangandaran dalam pelaksanaan pemilukada serentak, terutama terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di kabupaten pangandaran masih belum optimal dan harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dapt ditunjukkan dari koordinasi sosialisasi antara KPUD, PPK, PPS dan KPPS terhadap masyarakat sudah baik, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengerti artinya pemilihan gubernur (Pilgub), bahwa pemilihan ini akan menentukan

masa depan mereka 5 tahun kedepan, kurangnya strategi yang dilakukan oleh KPUD untuk menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat-tempat keramaian contohnya pasar, yang dilakukan untuk menjaring orang yang bepergian atau yang sedang berdagang dipasar, kurangnya perekrutan tenaga penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan terkait pemilihan umum kepala daerah serentak, terutama bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan masalah-masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menyarankan beberapa solusi berupa diharapkan adanya sosialisasi dengan lebih gencar lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, di harapkan adanya tempat-tempat khusus untuk masyarakat yang sedang berpergian dan yang sedang berdagang di pasar untuk memberikan kemudahan dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilihan umum kepala daerah, diharapkan adanya penambahan perekrutan tenaga penerjemah kepada penyandang disabilitas dan sosialisasi khusus kepada pemilih pemula.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Marrus (2002:31) memberikan pengertian tentang strategi adalah :

Strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.

Jadi secara umum strategi yaitu sebuah strategi merupakan sebuah upaya dan cara dalam mempertahankan mayoritas pemerintah, startegi dibentuk dalam memperkuat dan mempertahankan misalnya seperti partai yang akan tetap memelihara pemilih mereka. Strategi merupakan sebuah taktik yang dilakukan dalam keberlangsungan sebuah organisasi ataupun pemerintah.

2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum Dearah

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia khususnya di daerah, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Rizkiansyah (2017:1) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah Lembaga Negara yang lahir dari rahim reformasi. Kehadiran KPUD dalam struktur ketatanegaraan merupakan bentuk komitmen bangsa

untuk menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang luber, jurdil, jauh dari intervensi kekuasaan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD menurut Pasal 1 ayat (21) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah “ KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

3. Partisipasi masyarakat

Menurut McClosky dalam Budiarjo (2008:367) memberikan pengertian tentang partisipasi masyarakat adalah :

Kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Jadi secara umum partisipasi politik adalah sikap yang dilakukan seseorang untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan hak suaranya baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam

penyelenggaraan kehidupan Negara. Berkaitan dengan hal itu, KPUD juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program atau kegiatan akan gagal.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 14 orang informan yang terdiri dari 1 orang Ketua KPUD, 1 orang anggota KPUD, 3 orang PPK se-Kabupaten Pangandaran, 5 orang PPS se-Kabupaten Pangandaran dan 4 orang Tokoh Masyarakat Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*litelature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*)). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data;
2. Penyajian data; dan
3. Menarik kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran

Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran menggunakan teori menurut Newman dalam Andrianus (2006:211-212) terdapat empat pilihan strategi, yaitu :

a. Strategi Penguatan, yaitu memperkuat atau memperkuat badan atau lembaga guna menghasilkan kinerja yang baik.

Menurut Marrus (2002:31) secara singkat menjelaskan bahwa : “Strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai”.

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya KPUD sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, KPUD sudah membentuk penyelenggaran pemilihan umum yang kompeten dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota PPK, PPS dan KPPS, sudah melakukan komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik seperti *media centre*, *website* KPUD dan rumah pintar pemilu, selalu meningkatkan koordinasi antar anggota KPUD Kabupaten/Kota serta dengan KPU dan KPU Provinsi, serta dengan PPK, PPS

dan KPPS melalui rapat koordinasi dan melalui koordinasi lewat sosial media, serta Membentuk agen sosialisasi di tiap kecamatan sebanyak 2 orang. Namun masih ada sebagian pendapat bahwa strategi KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kurang optimal. Dan KPUD sudah menetapkan berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi hal ini dapat dilihat dari berbagai sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan semua penyelenggara pemilukada yang dilakukan oleh KPUD kepada masyarakat.

b. Strategi Rasionalisasi, yaitu memberikan informasi secara rinci tentang teknis pemilihan dengan menyebar potret yang berisi ajakan untuk memilih

Agus Dwiyanto (2006:80) berpendapat bahwa : Mendefinisikan tranparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan kaitannya dengan teori maka simpulannya bahwa strategi KPUD sudah maksimal. seperti KPUD sudah membuat selebaran kertas yang berisikan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat secara jelas, KPUD memberikan informasi kepada masyarakat melalui media eletronik, media cetak ataupun media social seperti koran, radio dan melalui WA, membuat gambar atau baliho yang bertuliskan seputar informasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur

jawa barat dan memberikan *sticker* mengenai jadwal dan tatacara memberikan hak pilih kepada masyarakat ke setiap rumah yaitu pada saat pelaksanaan pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP.

Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu yang mengatakan bahwa KPUD sudah cukup baik dan terbuka kepada masyarakat dalam memberikan berbagai informasi terkait dengan pemilihan umum kepala daerah kepada masyarakat.

c. Strategi Bujukan, yaitu strategi dalam memperkenalkan atribut-atribut kepada masyarakat pemilih guna mendapatkan hasil yang maksimal

Menurut Chandler dalam Salusu (2015:64) berpendapat bahwa: Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya strategi KPUD masih belum optimal, seperti Melakukan strategi tatap muka dan komunikasi massa, dengan metode yang digunakan yaitu diskusi. Jadi KPUD langsung bertemu dengan pemilih menginformasikan tentang aktivitas pemilih dalam hal ini masih banyak masyarakat yang acuh dengan

undangan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD, melakukan sosialisasi dengan intensif ke rumah-rumah berbagai golongan masyarakat dari sejumlah profesi hingga menjelang masa pemungutan suara dalam hal ini melakukan sosialisasi ke setiap rumah tidak dilakukan oleh KPUD dan badan adhoc lainnya karena akan memakan banyak waktu, melakukan gerak jalan sehat KPUD dalam rangka penggalangan dukungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu ini cukup efektif hanya saja perlu anggaran yang besar untuk melakukan sosialisasi melalui gerak jalan sehat ini, dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah atas dan sederajat terutama kepada para siswa sebagai pemilih pemula dalam hal ini masih terdapat sekolah yang tidak datang untuk mengirimkan siswanya untuk memenuhi undangan dari KPU.

Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu yang mengatakan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi undangan KPU dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membaca berbagai alat peraga terkait informasi pemilihan umum kepala daerah jadi masih terdapat masyarakat yang acuh dengan berbagai alat peraga terkait informasi pemilihan umum kepala daerah.

d. Strategi Konfrontasi, yaitu cara yang dilakukan KPUD kepada masyarakat yang bersikap apatis

Menurut Retno Tri Hariastuti dan Eko Darmanto (2007:54) berpendapat bahwa :

Konfrontasi dapat digunakan sebagai alat untuk membawa masyarakat untuk memusatkan perhatian pada bagian atau aspek-aspek perilaku yang jika diubah dapat membuatnya menjadi orang yang dapat bertindak lebih efektif.

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya strategi KPUD sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa kendala dalam melaksanakan strategi ini dimulai dari tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat pendidikan dan penyediaan anggaran dalam melakukan strategi ini.

KPUD sudah melakukan sosialisasi dengan memberdayakan tenaga yang ada seperti PPK, PPS, KPSS dan PPDP yaitu melalui sosialisasi gelar budaya untuk ditingkat kecamatan dan di tingkat desa dengan melalui berbagai kreasi seni di tunjukan untuk menarik minat masyarakat untuk ikut sosialisasi yang diadakan oleh KPUD melalui PPK dan PPS, melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti kepada masyarakat KPUD selalu memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui bahasa daerahnya sendiri atau bahasa sehari-hari yaitu bahasa sunda untuk mempermudah masyarakat dalam memahami apa yang disampaikan oleh KPUD, KPUD selalu memberikan keterbukaan kepada masyarakat bahwa KPUD tidak

berpihak kepada salah satu pasangan calon atau salah satu partai dengan dibuktikan melalui surat pernyataan bermaterai , memberikan *door prize* kepada kecamatan atau desa yang paling tertinggi dalam memberikan hak pilihnya dalam pilkada, ini masih dalam tahap perencanaan karena disesuaikan dengan anggaran.

Namun dalam hal ini di tunjukan dari hasil wawancara yaitu yang menyatakan bahwa strategi bujukan seperti memberikan *door prize* kepada desa atau kecamatan paling tinggi partisipasinya terkendala oleh anggaran yang belum ada anggaran untuk hal itu.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum KPUD sudah cukup maksimal dalam melakukan berbagai strategi. Hal ini di tunjukan dari hasil wawancara yaitu menyatakan KPUD sudah cukup baik dalam memberikan berbagai sosialisasi dan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah sudah baik, meskipun ada sebagian yang menyatakan belum maksimal.

Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran sudah berhasil, hal ini dilihat dari angka jumlah partisipasi masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang mengalami peningkatan sampai 1,59% dibanding tahun 2015 lalu pada pilbup Pangandaran yang mencapai 77,94 persen dan pada saat pelaksanaan Pilgub naik menjadi 79,53%. Pangandaran menduduki peringkat kedua sebagai Kabupaten tertinggi tingkat partisipasi masyarakatnya setelah Kota Tasikmalaya yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah partisipasi 81%, alasan kenapa partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran masyarakat Pangandaran berpolitik sudah meningkat dan masyarakat sadar akan pentingnya memberikan hak suaranya dalam pemilu serentak, data base Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah baik dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pangandaran dan kinerja dari KPUD dan badan adhoc lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah sangat baik.

Berdasarkan hasil observasi strategi KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan, walaupun masih ada beberapa indikator yang belum dilaksanakan seperti pemberian *door prize* kepada kecamatan atau desa paling tinggi partisipasinya dan melakukan sosialisasi ke setiap rumah-rumah. Hal

itu dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pemberian *door prize* dan akan menyita banyak waktu untuk melakukan sosialisasi ke setiap rumah-rumah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. 2015. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chandler. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Public Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Idris, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Pito, Toni Andrianus, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Terkonsolidasi*. Jakarta: Epicentrum Mahadaya Komunika.
- Rizkiansyah, Ferry Kurnia. 2017. *Pemilu dan Demokrasi Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa.

- Retno. 2007. *Political Explore: sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengembangan Penelitian Ilmiah Dasar (Dasar, Metode dan Teknik)*. Bandung : Tarsito.